

PERILAKU POLITIK KELAS MENENGAH MADURA¹

Fathol Haliq

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan

Jl. Pahlawan Km. 04 Pamekasan, Madura. Email: Fathol3000@gmail.com

Abstrak

Politik sebagai permainan seringkali menghadirkan paradoks bagi aktor politik. Masa Orde Baru, perilaku politik menghadirkan anomali yang menghadapkan masyarakat (*civil society*) dengan pemerintah, wacana pembangunan Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) melahirkan BASSRA vis-a-vis Orde Baru. Orde Reformasi, setelah keruntuhan Orde Baru, Mei 1998, para ulama' BASSRA tersedot ke lembaga legislatif dan eksekutif. Mereka telah menjadi bagian dari negara (state) sehingga –seharusnya– orang yang dulunya “berjuang bersama masyarakat” mengimplementasikan apa-apa yang telah diserap dalam masyarakat. Artikel hasil riset di Bangkalan dan Sumenep ini merupakan riset yang membahas dinamika perilaku politik kelas menengah Madura, terutama setelah keruntuhan Orde Baru, 21 Mei 1998 dan selesainya Pembangunan Jembatan Suramadu, 10 Juni 2009.

Abstract

Politics as a game often presents a paradox for politics actors. New Order era, politics behavior presents an anomaly that confronts society (*civil society*) and the government, development discourse Surabaya-Madura (Suramadu) Bridge spawned BASSRA vis-a-vis the New Order. Reform Order, after the fall of the New Order, in May 1998, the ulama' BASSRA sucked into legislative and executive institutions. They have become part of the state so that should-people who were "struggling with the community" to implement anything that has been absorbed into society. Articles on research in Bangkalan and Sumenep is research that discusses the dynamics of the middle class politics behavior in Madura, especially after the collapse of the New Order, May 21, 1998 and the completion of the Suramadu bridge construction, June 10, 2009.

Kata Kunci

BASSRA, Suramadura, kelas menengah, perilaku politik.

¹ Tulisan ini merupakan hasil diskusi dan revisi atas *Islam Madura: Studi Konflik, Adaptasi, Harmoni Kelas Menengah Madura Setelah Keruntuhan Orde Baru* yang dipresensikan pada AICIS X Banjarmasin Kalimantan Selatan

Pendahuluan

Sudah jamak diketahui bahwa Orde Baru (ORBA) dibawah rezim Soeharto, mengharamkan setiap diskusi, perdebatan apalagi berbeda pendapat dengan pemerintah.² Pada zaman ini penguasa adalah agen tunggal dari setiap perubahan politik, sosial, ekonomi, termasuk perilaku-perilaku keagamaan yang bersifat kolektif maupun individual. Kebudayaan direduksi sebagai bagian dari proses simbolik dengan hal-hal yang karikatif dan cenderung “monumental” sebagai bagian dari proses keberhasilan pemerintah. Menurut GL Acciaioli dan M Hitchcock, perayaan resmi tentang keragaman bangsa yang dikenal dengan Taman Mini Indonesia Indah/TMII di Jakarta, “memiliki sebuah kualitas abstrak dan simbolik, mereduksi kebudayaan daerah menjadi sebuah tontonan .. dalam wujud rumah dan pakaian adat”.³

Namun, ketika negara meminggirkan masyarakat dalam pengambilan keputusan di tengah aras tersebut identitas perlawanan yang khas Madura menjadi bangkit. Pembangunan jembatan Suramadu menjadi bagian dari “*bargaining position*” yang dilakukan masyarakat. Kehadiran kyai dan ulama’ pesantren –meminjam istilah Soekarno– menjadi penyambung lidah rakyat. Konsolidasi para pemimpin masyarakat ini melahirkan BASSRA (Badan

Silaturrahmi Ulama Pesantren Madura).⁴ Hal yang menarik Soeharto dengan seperangkat kekuasaan ABRI, Birokrasi dan Golkar –dikenal dengan ABG– menarik diri dengan merenegosiasikan pembangunan jembatan tersebut. Dalam negosiasi ini dilakukan dengan memfasilitasi BASSRA untuk melakukan kunjungan ke berbagai daerah yang dianggap berhasil oleh Orde Baru dalam industrialisasi.

Dalam konteks ini pembangunan Jembatan Suramadu merupakan sejarah pergumulan antara masyarakat Madura dengan pemerintah (negara) (*state vis-a-vis civil society*). Masyarakat Madura yang memiliki keterikatan keagamaan (Islam) yang cukup kuat diperhadapkan (*vis-a-vis*) dengan pemerintah Orde Baru di bawah rezim Orde Baru yang sangat otoriter. Pemilihan kata *civil society* dianggap ketidakberdayaan (*powerless*) menghadapi negara yang kuat (*powerfull*).⁵

Dalam konteks ini gerakan keagamaan/Islam menjadi perilaku kolektif melalui konflik, adaptasi dan harmoni. Konflik direpresentasikan dengan sikap dan perilaku yang tidak setuju dengan adanya pembangunan Jembatan Suramadu yang dikonotasikan “satu paket dengan industrialisasi” sehingga memunculkan wacana industrilisasi yang “khas Madura”.⁶

² R. William Liddle, *Crafting Indonesian Democracy*, (Bandung: Mizan, 2001); Suharsi dan Ign Mahendra K, *Bergerak Bersama Rakyat: Sejarah Gerakan Mahasiswa dan Perubahan Sosial di Indonesia*, (Yogyakarta: Resist Book, 2007); Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken, *Politik Lokal di Indonesia*, (Jakarta: KITLV Jakarta dan Buku Obor, 2007), hlm. 87

³ Jamie S Davidson, et.al, *Adat dalam Politik Indonesia*, (Jakarta: KITLV-Jakarta dan Pustaka Yayasan Obor Indonesia, 2010), hlm. 13

⁴ Muthmainnah, *Jembatan Suramadu: Respon Ulama terhadap Industrialisasi*, (Yogyakarta: LKPSM NU, 1998), hlm. 51-72

⁵ Mansoer Fakhri, *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 58-66

⁶ KH Alawi Muhammad, Pengasuh Paterongan Sampang Madura, misalnya mengusulkan Industrialisasi yang tidak meminggirkan masyarakat Madura dan tradisi-tradisi serta budaya local Madura, serta industrialisasi

Adaptasi menjadi bagian dari proses negosiasi antara stakeholder dengan masyarakat sehingga industrialisasi berkembang menjadi bagian dari proses yang “dimiliki secara langsung” oleh masyarakat. Mereka mampu memahami industrialisasi dan pembangunan jembatan Suramadu sebagai konsep dan pelaksanaan yang utuh. Harmoni adalah bagian penting dimana elit keagamaan (kyai dan ulama’) mengedepankan hal-hal penting dalam konteks penguatan civil society yang dapat menjadi pembelajaran bagi masa depan masyarakat Madura, yakni mereka (baca: masyarakat) terlibat secara langsung dengan melalui proses transformasi sosial (*social transformation*) untuk kesejahteraan masyarakat.

Pada proses pertama (baca: konflik) telah berlangsung sejak awal wacana industrialisasi dan pembangunan Jembatan Suramadu muncul ke permukaan yaitu masa Orde Baru, awal 1990-an.⁷ Proses ini dilukiskan dengan baik oleh Muthmainnah dalam tesis Pascasarjana Sosiologi UGM,⁸ meskipun tesis ini tidak secara mendalam meletakkan proses tersebut sebagai konflik antara masyarakat sipil (*civil society*) dengan negara/pemerintah (*state*).

Setelah keruntuhan Orde Baru, Mei 1998, terjadi proses adaptasi dan harmoni baik di kalangan elit (kyai dan

ulama’) maupun masyarakat. Penelitian ini mencari dua proses penting dalam sosial kemasyarakatan dan keagamaan. Secara lebih mendalam akan dikaji kembali dua proses tersebut terutama sejak elit keagamaan tidak lagi berhadapan (*vis-à-vis*) dengan pemerintah. Negara dan bangsa berbeda dengan pemerintah.⁹ Proses sosial dalam sikap dan perilaku inilah yang akan banyak dijelaskan dengan data-data penelitian, termasuk di dalamnya hal-hal yang berada di balik sikap dan perilaku keagamaan masyarakat Madura, terutama setelah terjadi proses transformasi sosial dalam masyarakat Madura.

Pada aras inilah kebudayaan dan agama merupakan bagian dari proses keberagaman individual dan komunal. Kebudayaan merupakan proses yang turut memberikan andil bagi kekayaan agama sebagai bagian dari proses ritual dalam tradisi-tradisi yang diamalkan oleh individu maupun masyarakat. Agama

⁹ Kesadaran ini terjadi ketika ada proses “schooling” dimana proses pendidikan tidak saja terjadi di pesantren telah mengalami proses schooling bagi lora dan nyai. Setelah menamatkan Madrasah Aliyah (MA) lora dan nyai meninggalkan pesantren menuju kota-kota pendidikan di Indonesia, khusus Yogyakarta (IAIN/UIN Sunan Kalijaga dan UGM), Jakarta (UIN/IAIN Syarif Hidayatullah) dan Surabaya (IAIN Sunan Ampel). Hal yang menarik dari proses pendidikan ini mereka (lora/nyai) berbaur dengan masyarakat (termasuk alumni pesantren tersebut) dengan mengedepankan nuansa intelektualitas dan lingkungan akademik yang membentuk pemahaman dan perilaku lora/nyai tersebut. Setelah mereka lulus dari perguruan tinggi mereka menjadi “second line” dari kyai/ulama sepuh dan mempengaruhi pemahaman orang tua/kyai dan nyai sepuh sehingga dalam keluarga kyai/nyai terjadi proses dialektika antara kalangan muda (lora/nyai) dan kalangan sepuh (kyai, ulama’/nyai), bahkan mempengaruhi santri dan cara pembelajarannya.

hendaknya tidak mencemari lingkungan di sekitar Madura.

⁷ Wacana ini dimunculkan oleh Mohammad Noer (Kelahiran Sampang Madura), yang memiliki reputasi dan pengalaman biroksi yang cukup berpengaruh di masa Soekarno (Orde Lama) dan Soeharto (Orde Baru) yaitu Bupati Bangkalan (1960-1965) dan Gubernur Jawa Timur (1971-1976) serta Dubes Perancis (1976-1980).

⁸ *Jembatan Suramadu: Respon Ulama terhadap Industrialisasi*, (Yogyakarta: LKPSM NU, 1998)

sebagai hal yang transenden membutuhkan kebudayaan yang profane, sehingga keagamaan menjadi bagian dari realitas kehidupan masyarakat dan individu yang dimanifestasikan dalam perilaku sehari-hari. Keberagamaan yang tidak bisa ditafsirkan dalam konteks tunggal menjadi bagian dari aras dan kehidupan sosial sekaligus keagamaan. Kecenderungan ini muncul dari proses dan manifestasi yang telah berlangsung dalam kurun waktu yang tidak bisa dijadikan “satu dalam ajaran/Islam”

Masyarakat Madura adalah entitas masyarakat yang taat mengamalkan nilai-nilai dan ajaran keagamaan/Islam sekaligus bagian dari kebudayaan,¹⁰ sehingga tidak mengherankan jika entitas budaya merupakan entitas keagamaan/Islam.¹¹ Meskipun agama (terutama Islam) tidak menjadi identitas dalam bernegara dan berbangsa. Kehadiran agama sebagai bagian dari *way of life* dan sistem sosial yang berjalan dalam kehidupan sehari-hari. Agama menjadi adat dari pola-pola kebiasaan dengan sejumlah sistem yang telah berlangsung secara berabad-abad. Membicarakan agama sebagai bagian dari struktur masyarakat merupakan hal lumrah dan tidak ditabukan namun menjadikan agama bagian dari struktur bernegara menjadi bagian yang perlu diperdebatkan dalam masyarakat, sehingga masyarakat tidak saja dijadikan bagian dari proses mobilisasi di kalangan elit politik untuk kepentingan sesaat.¹²

Transformasi sosial keagamaan ini semakin membuka ruang dialektika terutama bersamaan dengan adanya kesadaran desentralisasi politik. Keterbukaan ini menciptakan ruang lain bagi eksistensi elit keagamaan (kyai/ulama,/nyai serta santri) dalam proses pembangunan. Orde Baru dengan seperangkat alat penetrasi resistensinya ABRI, Birokrasi dan Golkar (ABG) menjadi “tumpul” di hadapan elit lokal, terutama di Madura yang mengutamakan falsafah “*bapa'-babu', ghuru dan rato*”. Bapak dan ibu adalah hierarkhi kepatuhan yang tidak bisa ditawarkan sehingga proses ini menjadi bagian yang hidup dalam perilaku masyarakat. Perilaku ini banyak dinilai sebagai bagian dari internalisasi nilai-nilai keagamaan yang mengutamakan orang tua sebagai orang yang dianggap memiliki otoritas dalam keluarga termasuk otoritas atas anak dan keturunannya. Pola ini sudah berlangsung berabad-abad sehingga keluarga yang dibalut dengan nilai keagamaan menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat Madura. “Ghuru” merupakan hierarkhi yang kedua dimana kekuatannya hampir sama dengan orang tua. Mereka (ghuru) adalah orang tua di sekolah dan madrasah sehingga ghuru adalah orang yang mendampingi anak setelah orang tua. Ghuru diasosiasikan dengan ulama/kyai/nyai/ustadz dan guru. Secara khirarkhis mereka dapat dikatakan memiliki peringkat tidak saja dalam proses pendidikan misalnya menjadi guru di madrasah atau sekolah, namun hal yang penting ghuru yang memiliki otoritas keagamaan terutama penguasaan ilmu agama. Dalam konteks ini otoritas tradisional dipadukan dengan otoritas formal dalam masyarakat Madura.

¹⁰ Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris: Madura 1850-1940*, (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002), hlm. 328

¹¹ Kuntowijoyo, *Radikalisasi Petani: Esei-Esei Sejarah*, (Yogyakarta: Bentang, 1994), hlm. 43

¹² Fathol Haliq, *Kuasa Komunal: Studi Kasus Perda Syariah Pamekasan*, (Pamekasan: STAIN, tt), hlm. 43

Sandaran Teoritik

Dalam psikologi sosial, perilaku merupakan konsep yang tidak tunggal. Dalam teori medan dijelaskan perilaku individu dilahirkan dari proses interaksi antara fungsi organisme dan lingkungan yang melingkupinya. Teori yang diungkap oleh Kurt Lewin dapat dijelaskan pula perilaku yang tidak tunggal tersebut dapat dijelaskan tidak saja dari aspek individu sebagai organisme namun ditelisik pula dari ruang dan waktu serta kebudayaan sebagai lingkungan (*milieu*).

Hubungan timbal balik antara organisme dan lingkungan menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari pembentukan perilaku individu. Kekuatan lingkungan menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari proses internalisasi nilai-nilai seseorang. Dalam teori empirisme bahwa lingkungan memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan dari perilaku individu bahkan individu menjadi “ditiadakan” dengan kehadiran lingkungan sekitarnya sehingga bagi kalangan ini lingkungan dengan aspek pengalaman merupakan hal yang utama dari perilaku manusia. Dalam perspektif tersebut apa yang dilakukan oleh individu sebagai bagian dari proses belajar sosial (*social learning process*). Teori Albert Bandura menjelaskan bahwa proses belajar dapat dilakukan dengan meniru (*imitasi*), sugesti, motivasi, dan reproduksi perilaku dan kebudayaan.

Reproduksi kebudayaan melalui proses belajar dapat dijelaskan dengan kebudayaan yang melingkupi individu. Kebudayaan merupakan proses yang diperoleh dari sistem, gagasan dan tindakan serta hasil karya manusia yang diperoleh dan dimiliki manusia dari hasil

belajar.¹³ Dinamika perilaku sosial keagamaan individu merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari nilai keagamaan, sosial serta lingkungan yang lain. Dinamika sosial kultural inilah yang membentuk perilaku keagamaan pada masyarakat Madura.

Clifford Geertz mengatakan bahwa agama merupakan sistem budaya yang secara historis-kultural ditransformasikan dalam pemaknaan terhadap simbol, sistem yang dikonsepsikan dalam ekspresi melalui relasi, dan berkembang dalam pengetahuan dan perilaku dalam masyarakat.¹⁴

“(1) a system of symbols which acts to (2) establish powerful, pervasive, and long-lasting moods and motivations in men by (3) formulating conceptions of a general order of existence, and (4) clothing these conceptions with such an aura of fatuality that (5) the moods and motivations seem uniquely realistic.”

Dalam pada itu agama merupakan seperangkat pedoman yang dijadikan interpretasi terhadap perilaku dan tindakan manusia, serta tampak dalam kehidupan sehari-hari.¹⁵ Di sini konstruksi individu dibentuk berdasarkan nilai dan norma sosial keagamaan (Islam) yang berpengaruh terhadap sistem sosial, cara pandang, serta perilaku masyarakat Madura, sehingga pengetahuan dan perilaku nyai

¹³ Koenjtaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986) hlm. 180

¹⁴ Walter H Capp, *Religious Studies: The Making of a Discipline*, (Amerika: Augsburg Fortress, 1995), hlm. 180-181

¹⁵ Nur Syam, *Islam Pesisir*, (Yogyakarta: LKiS, 2005), hlm. 1

tidak bisa dilepaskan dalam konteks kebudayaan masyarakat Madura.

Oleh karena itu, kerangka teoritik ini merupakan dinamika teori kerangka sosial keagamaan, sebagai sebuah produk dari kebudayaan¹⁶ yang dapat diteliti dan dikonstruksi melalui perilaku masyarakat Madura. Dalam hal ini penting pula menjelaskan agama sebagai bagian dari dinamika teoritis sebagai latar belakang kehidupan individu yang hidup dalam sikap dan perilaku yang senantiasa disandarkan kepada nilai-nilai agama sebagaimana masyarakat Madura pada umumnya.

Metode Penelitian

Penelitian etnografis ini mengambil tempat di dua Kabupaten paling Barat dan Timur Madura. Beberapa alasan akademis antara lain masyarakat Bangkalan telah lama menjadikan Surabaya sebagai “rumah kedua”, sehingga orang terbiasa hilir mudik antara Bangkalan (Madura) dan Ujung (Surabaya). Meskipun pada sisi lain “kekerasan prinsip” menjadi bagian yang tidak bisa ditawar khususnya bagi kalangan elit keagamaan (kyai dan ulama’). Sedangkan Sumenep dikenal sebagai “Keraton Yogya/Solo”nya Jawa yang memiliki *andhap ashor, tatakrama*, dengan segenap perilaku sosial yang penuh dengan “enggih-ungguh” yang seringkali selaras dengan kyai dan ulama’ Sumenep dalam menyikapi konflik. Perbedaan nilai dari perilaku inilah yang menarik perhatian ini khususnya berkaitan dengan perilaku sosial keagamaan di tengah persoalan tradisi (keagamaan/Islam) dan industrialisasi yang berkembang di daerah Madura.

Penelitian ini akan menggali data-data yang terkait dengan perilaku sosial keagamaan khususnya berhubungan elit keagamaan (kyai/nyai dan lora/nyai serta masyarakat) terutama pesantren di Kabupaten Sumenep dan Bangkalan. Penelitian ini akan menggali secara mendalam (*depth-interview*) hal-hal di balik sikap dan perilaku keagamaan khususnya berkaitan dengan perubahan dan transformasi sosial akibat dari pembangunan Jembatan Suramadu dan transformasi politik lokal yang semakin menguat di kalangan elit keagamaan. Penelitian ini pula akan mengambil subyek penyeimbang (*variabel kontrol*) terhadap peran-peran yang dimainkan (*role-playing*) seperti guru dan ustadz serta masyarakat yang diambil secara acak ketika penelitian ini berlangsung Januari-Februari 2010, serta waktu yang tidak terbatas di tengah kegiatan kelompok belajar mahasiswa melalui praktikum yang terjadi Mei 2009 dan Juni 2010. Gambaran dan data terserak ini menjadi bagian yang utuh sebagai sejarah yang tidak bisa dipisahkan dari perilaku sosial keagamaan masyarakat Madura.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian etnografi, yang di dalamnya peristiwa kultural, yang menyajikan pandangan hidup (*point of view*), pola relasi dan interaksi (*physical setting*), dan kegiatan sosial ekonomi subyek penelitian, dengan maksud menggambarkan dan memahami (*describ and understood*),¹⁷ peristiwa tentang sebuah fenomena dalam masyarakat Madura. Dalam penelitian ini, akan dideskripsikan tentang cara, motivasi hidup dan bekerja, pola peran, relasi dan

¹⁶ Clifford Geertz, *Kebudayaan dan Agama*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992)

¹⁷ Norman K Denzin dan Yvonna S Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, (London: Sage Publications, 1994), hlm. 30

interaksi melalui konflik, adaptasi dan harmoni dalam masyarakat Madura.

Setelah observasi, analisis dokumentasi dan wawancara yang merupakan cara pengumpulan data, selanjutnya data dicatat secara deskriptif dan reflektif yang kemudian dianalisis. Analisis data ini dilakukan dalam rangka mencari dan menata (mengkonstruksi) secara sistematis catatan (deskripsi) hasil wawancara, observasi, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman dan pemaknaan peneliti tentang obyek penelitian.¹⁸ Penelitian ini menggunakan perpaduan dua metode analisis data yakni, pertama, interaksi simbolik yang digunakan untuk mengembangkan teori. Pola pikir ini berangkat dari empiri dan selanjutnya yang empiri ini digunakan untuk menyusun abstraksi. Metode ini menggunakan pola pikir historik-ideografik, yakni tata pikir yang mengatakan bahwa tidak ada kesamaan antara sesuatu dengan yang lain karena beda waktu dan konteks. Kedua, analisis *comparative constant* dimana mencari konteks lain dalam rangka mencari pemaknaan dibalik yang empiri sebagaimana dimaksud di atas, hingga peneliti memandang cukup bagi konseptualisasi teori. Pada tahap ini tata atau pola pikir analisis data yang dipakai adalah pola pikir reflektif, yakni proses mondar mandir antara yang empirik dengan yang abstrak (makna). Satu kasus empirik dapat menstimulir berkembangnya konsep abstrak yang luas dan menjadikan mampu melihat relevansi antara empiri satu dengan empiri lain yang termuat dalam konsep abstrak baru yang dibangun oleh peneliti.

¹⁸ Sutopo, *Metode*, hlm. 91-93. Bandingkan dengan pendapat S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1992) hlm. 128-130.

Perilaku Paradoks Kelas Menengah Madura

Dalam transformasi sosial politik masyarakat Madura ada dua hal penting yang dapat dicatat berkaitan dengan kelas menengah Madura. Momentum pertama adalah Gerakan Reformasi, 21 Mei 1998 yang menggerakkan sendi-sendi politik dan relasi kuasa dalam masyarakat Madura. Momentum kedua berkaitan dengan telah selesainya pembangunan Jembatan Suramadu, yang diresmikan tanggal 10 Juni 2009. Jembatan sepanjang 5,438 meter merupakan penghubung dua pulau yang terpanjang se-Asia Tenggara menghabiskan dana 3,4 trilyun.¹⁹ Jembatan ini secara luas telah menggerakkan roda perekonomian terutama di bagian Selatan Madura yang membentang mulai dari Kwanyar (Bangkalan), Camplong dan Tanjung (Sampang), Branta dan Tlanakan (Pamekasan) sampai Prenduan dan Kalianget (Sumenep).

Meskipun dua momentum ini disikapi secara berbeda oleh kalangan elit dan masyarakat Madura, bagi kalangan kelas menengah Madura ada kecenderungan politik kuasa kultural bergeser politik struktural. Momentum Pemilihan Umum dan Pemilu Kepala Daerah menjadi ajang eksistensi elit kekuasaan di Madura. Mereka berlomba untuk merebut kepercayaan masyarakat. Sayangnya demokrasi yang dirumuskan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat menimbulkan kecenderungan yang tidak sehat dalam politik kekuasaan di dua daerah tersebut.

¹⁹ Kompas, 15 Juni 2009, Kompas 30 Juni 2009, Surya, 5 Juni 2009

"Hari ini terjadi "persaingan ketat" dalam satu pesantren (Pesantren Basiirun) untuk memperebutkan satu tiket menjadi anggota DPRD. Kandidat pertama adalah kyai yang jadi "kutu loncat" -begitu sebutan masyarakat—mulai dari Partai Bersatu dan Partai Kekuatan sebut saja K.H. Samiun yang bersaing dengan Mat Halal yang merupakan ustadz lembaga tersebut. Keduanya berasal dari partai yang sama. Kyai Samiun hanya unggul 15 suara dari Mat Halal. Kandidat kedua pun meradang, ada kecurangan di Dusun Gunung Desa Tengгах. Akhirnya perselisihan tersebut dibawa ke KPU dan Panwas Kecamatan Ghafuri. Hal yang menarik Ketua Penyelenggara Pemilu Kecamatan (PPK), Suri adalah keponakan K Samiun, sedangkan Ketua Panwas adalah sepupu yang berasal dari lembaga yang sama."²⁰

Arus reformasi yang demikian kencang telah memberikan peluang kepada elit lokal untuk menunjukkan eksistensinya. Partai politik yang terbentuk setelah Orde Baru menjadi berbagai potensi yang berkembang dalam masyarakat sebagai alat politik kekuasaan. Kecenderungan ini terutama terjadi pada partai-partai yang tidak memiliki kaderisasi yang kuat dalam partai, sehingga rekrutmen untuk menjadi elit partai diambil dari individu yang telah "jadi dan membumi" di

kalangan masyarakat Madura. Sebagai basis pesantren dengan tradisi Nahdlatul Ulama (NU) yang kuat lembaga cultural ini menjadi bagian dari ajang perebutan orang-orang potensial dalam masyarakat. Sehingga pada tahap tertentu "mengganggu" tidak saja kepada eksistensi kyai/santri/nyai pun menjadi boomerang pada dua lembaga sebagai cagar kebudayaan dan moralitas masyarakat Madura, yaitu pesantren dan NU. Dampaknya dalam sebuah kampanye Pemilukada 2004, beberapa kandidat Bupati, yang berasal dari kalangan kyai "mengaku sebagai orang yang bukan berasal dari kyai".²¹

Politik adalah permainan (the politics is game). Permainan mengadu peran dengan melalui mobilisasi dan kontestasi serta konflik baik pada skala yang lebih kecil maupun luas menjadi bagian yang paling menarik bagi elit Madura. Bagi masyarakat kebanyakan, permainan politik ini menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kontestasi antara politisi dan birokrasi. Seorang pengurus Nahdlatul Ulama' (NU) menceritakan bagaimana permainan tersebut berlangsung.

"Tello are se tapongkor beberraapa wartawan, pengusaha, birokrat, serta bupati dan politisi akompul e Aula Kolbar. Mereka acareta keberhasilan pembangunan se ampon ecapai. Sayangnya, mereka

²⁰ Fieldnote, 25 April 2009. Seluruh nama yang merujuk kepada orang dan pesantren serta tempat disamarkan, demi menghindari hal-hal yang tidak dikehendaki dan memelihara harmoni dalam masyarakat Madura.

²¹ Kandidat dari Partai Pohon memberikan orasi kampanye ketika melihat fenomena kyai yang dianggap telah berpaling dari masyarakat, sehingga diprediksi oleh berbagai kalangan Bupati 2004-2010 adalah orang yang professional dan bukan berasal dari kyai, padahal kandidat tersebut berasal dari pesantren. Di sisi lain, sentimen negatif ini mulai terjadi dimaksudkan untuk "berbeda" dengan kandidat incumbent yang berasal dari kalangan kyai.

tak alibattaghi masyarakat se ebakkele. Konon wartawan eparenge obhang sareng bupati, tak oneng kaangguy ponapa. Manabi mereka akompol biasana badha dheal-politics, mungkin terkait kalaban kasus Bank Tanah. Tape kaula tak tao. Otaba terkaet sareng jabatan bupati se hamper akher neka. Tape kaula prihatin kalaban akompolla pangadja. Pasera se ngancae rakyat. Rakyat kare kadhibi'an. Kaula ngarep cakanca anak muda NU ngawal agenda rakyat ke depan"²²

Ungkapan dan harapan dari tokoh NU ini menjadi bagian dari keprihatinan masyarakat, karena elit yang telah melupakan agenda-agenda pemberdayaan. Dalam beberapa hal, kyai yang banyak terlibat dalam persoalan-persoalan pemerintahan justru menjadi "alat bagi permainan" birokrat. Tidak mengherankan jika Hasil Investigasi Lakpesdam NU, pengendalian dana APBD banyak bergulir dalam birokrasi, bahkan ada indikasi terjadi proyekisasi dana bantuan dan dana insidental pada kalangan birokrasi.

"... ketika saya menghadap kepada staf Kepala Dinas, tiba-tiba datang "ajudan" untuk menyatakan sesuatu. "Ya, untuk menyenangkan bupati berilah lima puluh juta untuk Bazar Sembako Murah. Ambil beberapa kantong beras, gula dan minyak goreng. Terserah sampeyan!" begitu kata Kepala Dinas tersebut. Penasaran, hari Sabtu saya mendatangi Bazar Sembako dinas tersebut. Sungguh

saya saksikan "warung kecil" 3 x4 dengan beberapa bungkus sembako dianggarkan 50 juta. Sungguh ironis!"

Birokratisasi program dan korupsi dalam tingkat tertentu menunjukkan adanya ketidakberhasilan kalangan politisi memberdayakan masyarakat. Pada tataran program kebijakan menjadikan pelaksanaan kabur dengan ketidakadaan political-will untuk merubah dan memberdayakan masyarakat. Hal inilah yang menjadi keprihatinan bagi Pak Laras, karena ternyata eksistensi elit keagamaan pada tataran tertentu tidak menjadi bagian dari proses pemberdayaan. Mereka (elit keagamaan) pada tataran tertentu menjadi "permainan" para birokrat. Sayang ketika hal ini diingatkan seorang informan mengatakan "dhinggal pon manabi badha se korupsi, pokokna banni kaula," begitu bupati menangkis isu korupsi di kalangan birokrasi.

"...seorang wartawan harian lokal dianiaya di lapangan di Madura... konon, tiga hari sebelumnya wartawan tersebut memberitakan beberapa korupsi aparaturs serta istri-istri penguasa daerah tersebut. Orang tersebut menggunakan preman untuk melampiaskan dendamnya. Wartawan tersebut dipukul kepalanya. Untunglah tidak meninggal seperti Udien, wartawan Bernas Jogjakarta."

Penemuan penting dari penelitian ini adalah ada keberdayaan ekonomi pada kelas menengah di tempat strategis daerah Madura. Jembatan Suramadu yang berada di daerah gerbang Barat Madura menjadi titik nadzir dari migrasi

²² Wawancara dengan Pak Laras, pengurus Nahdlatul Ulama' (NU), 20 April 2010.

masyarakat. Beberapa tempat hunian telah banyak dibangun di area bibir pantai.

“Di kota tersebut ada sebuah tempat/kompleks perumahan mewah yang hampir seluruh penghuninya tidak pernah ada di tempat. Mereka hanya datang tiga bulan sekali. Mereka memiliki istri kedua atau ketiga yang diberikan rumah dengan perabotannya. Mereka adalah para awak kapal laut atau pegawai yang berada di Surabaya dan Sidoarjo.”

Proyek perumahan yang besar tersebut memancing beberapa orang untuk terlibat dalam jual-beli tanah. Tidak hanya kalangan profesional, tukang becak dan pedagang kelontong di daerah Jalan Lingkar Jembatan Suramadu menjadi “pengasong tanah” yang dijual berdasarkan penawaran tertinggi. Hal peneliti pernah alami ketika berhenti di Pertigaan Jalan Lingkar Suramadu yang ditawarkan sebidang tanah, dekat dengan jalan yang ditawarkan 500 ribu per meter dengan luas 2.000 meter.

Jalan merupakan urat nadi perkembangan ekonomi. Di daerah tersebut perkembangan perumahan sebagai hunian alternatif setelah Surabaya dan Sidoarjo bermunculan di tiga kecamatan. Mereka menempati tempat tersebut sebagai “tempat kedua”. Berbeda dengan itu, di daerah Timur Madura, perkembangan ekonomi dimulai dengan adanya investasi besar terutama pada Pabrik Rokok Gudang Garam yang mulai melakukan uji-coba pada awal tahun 2009. Tidak dijelaskan berapa nilai investasi yang dikeluarkan namun uji coba telah dilakukan dengan

menunjukkan pula perluasan area pabrik rokok tersebut.

Setali tiga uang, beberapa pedagang besar tembakau di daerah Prenduan dan Kapedi telah memulai investasi dalam bidang ini. Mereka berlomba membangun gudang tembakau yang lebih besar. Hal yang menarik hampir rata-rata pemain tembakau ini memiliki kesalehan ibadah yang tidak diragukan. Haji yang diwajibkan bagi kalangan yang mampu, bagi mereka sebagai perjalanan ruhani biasa karena telah “terbiasa bolak-balik” Madura-Jakarta-Mekkah. Mereka memiliki tiga bisnis sekaligus yaitu tembakau (pertanian), pengeringan ikan teri (perikanan), dan biro perjalanan Indonesia-Mekkah.

“ ... saya tidak bisa berpikir bagaimana orang berhaji memiliki pola pikir membeli tembakau murah dari petani (ketika musim tembakau), menumpuknya di gudang besar (antara musim kemarau dan penghujan) lalu setelah hujan mulai turun menyetornya ke gudang-gudang tembakau seperti Gudang Garam (Kediri), Sampoerna dan Djarum (Kudus). Bukankah dalam Islam membeli murah dan menimbun, serta mengeluarkannya ketika masyarakat membutuhkan hukumnya riba?”

Kritik dari seorang santre ini menjadi bagian dari protes masyarakat terhadap kelas menengah yang tidak memperdulikan “jeritan petani tembakau”. Mereka telah menanam, menyiram, mencari ulat/hama, *memasat* dan menjemur tembakau dalam jangka waktu tiga-empat bulan. Mereka sebagai masyarakat petani tidak dihargai sebagai

bagian dari proses pemberdayaan (*empowering people*), justru yang terjadi adalah ketidakberdayaan (*powerless*). Protes ini juga dialamatkan kepada lembaga keagamaan NU dan Muhammadiyah yang tidak “bergerak” dengan fatwa-fatwa yang berpihak kepada petani. Seolah perilaku elit bertolak belakang dengan perilaku kaum alit padahal hampir seluruh elit memiliki pendidikan tinggi termasuk pesantren dengan kajian kitab yang mumpuni. Lalu, siapakah yang akan berpihak kepada petani dan masyarakat kecil (*reng kenek*).

Demokrasi yang berkembang di Madura tidak dibarengi dengan tingkat kesejahteraan di kalangan *reng kene'*. Mereka menjadi bagian dari proses adaptasi dan harmoni dalam ajaran-ajaran keagamaan (Islam) dan kebijakan lokal berkaitan dengan kepemimpinan. Masyarakat Madura yang taat kepada ajaran (Islam) hanya memperbincangkan dengan sarkastis elitisme yang terjadi pada pemimpin keagamaan yang hijrah kepada pemimpin politik.

“... dalam sebuah hajatan hotmil Qur'an dan aqiqah seorang pemimpin keagamaan di Ghafury, tiba-tiba beberapa orang riuh rendah di tempat penyambutan tamu. Seseorang di belakang peneliti, berbisik pelan, “bupati datang,” katanya dengan nada rendah dan sinis.”

Lalu, bagaimana masyarakat menyikapi perilaku keagamaan elit keagamaan dan ekonomi di Madura? Riset ini menemukan adanya sikap kecewa dari masyarakat terhadap birokrasi dan aparatus pemerintahan karena mereka “seolah tidak peduli” dengan keadaan masyarakat. Mereka seringkali menghukum pemimpin

dengan cara tidak memilihnya pada masa keduakalinya. Mekanisme lima tahunan ini cukup panjang sehingga membuat beberapa orang mulai apatis terhadap pemilihan umum termasuk pemilukada. Fenomena ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap mekanisme demokrasi yang telah susah payah diperjuangkan, bahkan ujung-ujung dari demokrasi adalah duit (*money politic*). Meskipun harapan demokrasi yang bersih masih relatif tumbuh terutama dari kalangan anak muda yang memiliki idealisme dan lulusan perguruan tinggi agama Islam, baik lokal maupun Yogyakarta, Jakarta, Surabaya dan Malang.

“Organisasi kami ditawari duit, lima ratus ribuan asalkan mensukseskan calon bupati tersebut. Kami tidak mau, dikiranya Fatayat adalah orang goblok yang tidak tahu apa-apa. Kami dikira anak lulus SD yang mudah dikibuli dengan uang tersebut. Kami punya harga diri. Kami tidak mau dengan cara-cara kotor untuk memilih pemimpin.”

Penemuan lain dari penelitian ini, masyarakat “menyerahkan pemimpin tersebut kepada Allah”. Dimana kekuatan politik kuasa diperhadapkan dengan kuasa Pemilik Alam Semesta melalui doa-doa di berbagai forum-forum masyarakat. Gelombang doa ini pun muncul dari berbagai kompolan-kompolan baik laki-laki maupun perempuan. Pada laki-laki, misalnya berkembang Istighasah Kubro dengan nama “Dzikrul Ghafiliiin”. Ritualisasi melalui doa ini diharapkan dapat mengingatkan pemimpin terutama pada tingkat lokal. Kompolan-kompolan yang mengkaji kitab tasawuf yang berupa penerimaan terhadap perilaku sosial

yang menyimpang dari ajaran-ajaran keagamaan, dengan mendoakan pemimpin dan orang lain agar berubah. Realitas ini menggambarkan betapa masyarakat telah menemukan mekanisme sosial untuk mengungkapkan kekesalan dan kekecewaan melalui doa-doa, yang seringkali oleh banyak kalangan intelektual tidak efektif.

Analisis dan Diskusi Penelitian

Perkembangan demokratisasi dan pembangunan infrastruktur di Madura tidak mampu memberikan kesejahteraan bagi *ring kene'*. Mereka seringkali diperhadapkan dengan ketidakberdayaan (*powerless*) ketika menghadapi kenyataan dan kebutuhan hidup sehari-hari. Tidak cukup bagi mereka untuk menggugah kesadaran politik penguasa demi kesejahteraan masyarakat Madura. Kekuatan politik yang relatif besar dengan memberikan kepercayaan kepada seorang pemimpin tidak cukup hanya dengan mengandalkan "lima menit untuk lima tahun" di TPS ketika Pemilu dan Pemilukada. Pemimpin/termasuk wakil masyarakat seolah-olah "terpisah dari masyarakat".

Berdasarkan penelitian ini telah terjadi "demarkasi demokrasi". Dimana demokrasi menguntungkan bagi kelas menengah masyarakat Madura. Demokrasi tidak mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Demokrasi justru menciptakan elit kuasa baru di bidang politik dan ekonomi. Seorang informan mempertanyakan adanya anggaran fasilitas kendaraan sepeda motor bagi kalangan aparatus negara di tingkat lokal atau beberapa proyek yang sengaja dititipkan kepada kalangan birokrasi. Demarkasi demokrasi sebagai bagian dari proses ketidakseimbangan antara kran politik yang terbuka lebar dengan kapabilitas

dan kapasitas monitoring yang dilakukan berbagai organisasi politik dan sosial keagamaan. Pemerintah seolah memiliki kuasa untuk mengalokasikan, melaksanakan dan mengatur dan memonitor terhadap anggaran. Kuasa anggaran hanya dimiliki eksekutif, yang seringkali "dipesan" oleh legislatif. Kelas menengah Madura, khususnya yang terlibat dalam wilayah politik kuasa lebih cenderung diuntungkan dalam proses demokrasi.

Di samping itu hal yang memprihatinkan dan ironis adalah demarkasi politik dilakukan oleh kelas menengah lokal yang diharapkan mampu merubah keadaan masyarakat sekitarnya. Ekspektasi yang besar ini sesuai dengan arah perubahan politik yang berawal dari sentralisasi kepada desentralisasi. Sentralisasi merupakan bagian dari proyek politik Orde Baru yang dinilai gagal dalam memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, karena seluruh sistem dan aparatus dijadikan "satu paket" yang diusung oleh negara/penguasa melalui birokratisasi yang dilakukan oleh ABRI dan Golkar. Realitas historis ini menjadikan aparatus menjadi terasing dari masyarakat. Mereka (baca: aparatus) membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk sosialisasi kepada masyarakat. Pada sisi lain desentralisasi melahirkan kelas menengah yang berkuasa yang, sayangnya tidak jauh berbeda dengan apa yang telah dilakukan aparatus pada zaman Orde Baru. Hal yang cukup memprihatinkan adanya kenyataan bahwa orang yang relatif dekat dengan masyarakat, ketika menjadi pemimpin relatif menjauh dari kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang telah lama mereka pahami.

Hal lain agama hanya dijadikan bagian dari ritual semata sementara substansi dari nilai keagamaan (Islam) sebagai bagian dari inti keagamaan diabaikan dari konteks sosial dan kemasyarakatan. Ironisnya pada tahap tertentu telah terjadi politisasi keagamaan untuk membenarkan perilaku kelas menengah di Madura. Perilaku yang lahir dari realitas sosial dan politik serta budaya patronase pada masyarakat Madura. Kekuatan agama sebagai nilai dan substansi dari individu dan kolektivitas masyarakat menjadi bagian yang dinafikan dari realitas sosial. Agama hadir sebagai bagian dari masyarakat yang membutuhkan spiritualitas keagamaan individual ketika mereka ditimpa musibah dan penderitaan lainnya.

Daftar Pustaka

- Capp, Walter H, *Religious Studies: The Making of a Discipline*, Amerika: Augsburg Fortress, 1995;
- Davidson, Jamie S., et.al, *Adat dalam Politik Indonesia*, Jakarta: KITLV-Jakarta dan Pustaka Yayasan Obor Indonesia, 2010;
- Denzin, Norman K dan Yvonna S Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, London: Sage Publications, 1994;
- Fakih, Mansoer, *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996;
- Geertz, Clifford, *Kebudayaan dan Agama*, Yogyakarta: Kanisius, 1992;
- Haliq, Fathol, *Kuasa Komunal: Studi Kasus Perda Syariah Pamekasan*, Pamekasan: STAIN, tt.;
- Koenjtaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1986 ;
- Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris: Madura 1850-1940*, Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002.
- Kuntowijoyo, *Radikalisasi Petani: Esei-Esei Sejarah*, Yogyakarta: Bentang, 1994;
- Liddle, R. William, *Crafting Indonesian Democracy*, Bandung: Mizan, 2001;
- Muhajir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rakesarasin, 1996;
- Muthmainnah, *Jembatan Suramadu: Respon Ulama terhadap Industrialisasi*, Yogyakarta: LKPSM NU, 1998;
- Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 1992;
- Nordholt, Henk Schulte dan Gerry van Klinken, *Politik Lokal di Indonesia*, Jakarta: KITLV Jakarta dan Buku Obor, 2007;
- Suharsi dan Ign Mahendra K, *Bergerak Bersama Rakyat: Sejarah Gerakan Mahasiswa dan Perubahan Sosial di Indonesia*, Yogyakarta: Resist Book, 2007;
- Syam, Nur, *Islam Pesisir*, Yogyakarta: LKiS, 2005;
- Kompas, 15 Juni 2009;
- Kompas 30 Juni 2009;
- Surya, 5 Juni 2009